

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pada tanggal 20 Januari 2017 Donald Trump resmi dilantik sebagai Presiden Amerika Serikat yang ke 45. Masa kampanye yang sangat sengit antara 2 kubu yaitu kubu Donald Trump dan kubu Hillary Clinton akhirnya dimenangkan oleh Donald Trump. Setahun sudah dilewati Donald Trump dalam memimpin Amerika Serikat. Selama satu tahun masa kepemimpinan itu Donald Trump melekat dengan pernyataan-pernyataan yang kontroversial, Trump juga gemar mengagetkan Dunia Internasional dengan pernyataan-pernyataan provokatifnya. (Purnama, 2018)

Dari soal perang nuklir dan ancaman terbuka terhadap Korea Utara, supremasi kulit putih dan isu ras, kontroversi mengenai Meksiko dan Muslim (Purnama, 2018), lalu yang terakhir tentang pengakuan bahwa Yerusalem merupakan ibu kota dari Palestina (BBC Indonesia, 2017). Selain itu Presiden Trump juga mengeluh mengenai imigran yang disebutnya datang dari negara-negara “shithole” yakni negara-negara miskin yang datang dari benua Afrika. (Welle, 2018)

Dalam segi ekonomi pun Trump juga mengeluarkan kebijakan yang kontroversial mulai dari proteksi perdagangan sampai dengan keputusannya keluar dari perjanjian dagang NAFTA. Bahkan kegagalan kompromi di Senat AS mengenai pendanaan operasional pemerintah, dan berujung pada ‘Government Shutdown’ pun juga menjadi kontroversi Trump selama setahun menjabat. (Kurniawan, 2018)

Lepas dari kontroversi Trump selama setahun ia menjabat, tidak dapat dipungkiri bahwa Amerika merupakan negara urutan nomer 3 dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia. Pada tahun 2015 jumlah

penduduk di Amerika sekitar 270 juta jiwa dengan komposisi penduduk beragama Nasrani sebesar 55%, Yahudi 3%, Muslim 1,5% dan selebihnya agama-agama lain yang bermacam-macam. Komposisi jumlah penduduk beragama Islam sebanyak 1,5% merupakan turunan dari berbagai macam suku yang melakukan migrasi ke Amerika. Jumlah Imigran yang datang ke Amerika pada tahun 2015 mencapai angka 3.378.000,- jiwa, Imigran tersebut datang dari berbagai negara seperti Eropa Timur, Timur Tengah /Afrika Utara, Su Sahara, Asia, Karabia, Amerika-Afrika. (Khalik, Sejarah Perkembangan Islam Di Amerika, 2015)

Di era kampanye, Trump pun memiliki slogan kampanye "*Make America Great Again*". Perbaikan sistem di dalam negeri dan restorasi kekuatan hegemoni Amerika Serikat di level dunia merupakan kunci kampanye Trump. (dw.com)

Namun pada masa kampanyenya, Trump juga berfokuskan terhadap imigran muslim untuk menarik perhatian masyarakat. Hal tersebut dibuktikan dari masa kampanyenya, dimana ia kerap melontarkan komentar keras terhadap persoalan imigran, terutama imigran muslim. Sehingga membuat ia sulit untuk menerima suara dari kelompok minoritas (kelompok muslim).

Selain itu Trump juga cenderung vokal terhadap isu Islam "Radikal" dan terorisme, bahkan sampai ia berjanji untuk tidak hanya membatasi, tetapi melarang masuknya imigran muslim yang berasal dari negara-negara Islam yang diduga menjadi asal terorisme. (dw.com)

Dibuktikan pada saat Trump berkampanye yang digelar di Trump Tower, Fifth Avenue, New York pada Kamis 3 September 2015, Trump sempat mengatakan kepada awak media jika Trump terpilih dalam pemilu tahun depan, beliau akan serius menghentikan orang Islam untuk dapat masuk ke Amerika serikat dengan larangan yang akan diberlakukan dari pintu darat, laut

maupun udara. Pada BBC tertanggal 8 Desember 2015, Trump sempat mengatakan

*“Total and complete shutdown should remain until the US authorities can figure out Muslim attitudes to the US”.* (BBC News, 2015)

Trump juga mengatakan

*“They should be banned until our country’s representatives can figure out what is going on, that would apply to everybody, that would-be immigrants and tourists. Until we are able to determine and understand this problem and the dangerous threat it poses, our country cannot be the victims of horrendous attacks by people that believe only in Jihad, and have no sense of reason or respect for human life”.* (BBC News, 2015)

Dalam pernyataannya, Trump melarang muslim masuk Amerika berlaku sampai Amerika bisa memutuskan dan mengerti permasalahan mengenai ideologi Islam dan ancaman-ancaman yang berbahaya bagi Amerika. Menurutnya Amerika tidak bisa menjadi korban serangan kaum yang percaya pada konsep jihad dan tidak memiliki nalar untuk menghormati sesama manusia.

Dalam pemberitaan di Merdeka.com tertanggal 17 November 2015 Trump juga menegaskan untuk segera menutup masjid-masjid di Amerika sebagai bagian dari upaya untuk mencegah serangan garis keras di negara itu. Menurutnya penutupan masjid-masjid dikarenakan banyaknya pembicaraan mengenai aksi teroris yang bermula dari masjid. Oleh karena itu Trump menindaklanjuti hal tersebut sebagai kewaspadaan terhadap teror yang dilakukan oleh orang Islam.

Namun sebelum Trump mencalonkan dirinya sebagai Presiden beberapa tahun lalu, Trump secara terang-terangan mengeluarkan pernyataan soal ‘permasalahan dengan umat muslim’. Pada tahun 2010,

Trump pernah ingin merencanakan pemberhentian pembangunan masjid dan pusat komunitas muslim di Ground Zero, dimana lokasi gedung World Trade Center yang diserang oleh Al-Qaidah pada 11 September 2001 yang lalu. Hal ini pun sudah menjadi cerminan diri trump dimana beliau adalah salah satu sosok yang anti muslim.

Tak heran apabila pada masa kampanyenya, Trump membawa AS lebih sentimen terhadap Muslim. Trump kerap melontarkan pernyataan kontroversial yang mendiskreditkan umat Muslim. (Agestu, 2015) Merujuk pada data Badan Investigasi Federal (FBI), jumlah kejahatan berlandaskan sikap anti-Islam di AS pada tahun 2015 pun mengalami angka tertinggi kedua setelah pada tahun 2001 yaitu membungkus angka 296 laporan. (Samosir, 2016)

Menurut data dari Southern Poverty Law Center menyebutkan jumlah kelompok sentimen antimuslim AS naik tiga kali lipat pada tahun 2016. Peningkatan ini disebabkan karena keberadaan Donald Trump sebagai Presiden AS. Data dari Southern Poverty Law Center pada tahun 2015 terdapat 34 kelompok sentimen antimuslim di AS. Dan pada tahun 2016 terdapat 101 kelompok sentimen antimuslim. Angka tersebut naik secara drastis dari tahun sebelumnya.

Kelompok antimuslim menganggap Islam sebagai ideologi politik yang jahat dan bukan merupakan agama. Kelompok antimuslim juga percaya bahwa umat muslim mencoba untuk mengganti hukum Amerika dan Eropa dengan hukum syariah. Masyarakat AS juga masih sangat minim informasi tentang Islam. Walaupun tetap ada informasi yang masuk mengenai islam namun banyak informasi tersebut yang tidak benar. Bangsa AS menganggap Islam adalah agama yang tidak agamis berbeda dengan Yahudi yang dianggap mereka sebagai agama yang agamis dan selalu di tindas oleh Islam. Mereka beranggapan bahwa Yahudi adalah agama yang selalu di serang oleh Islam. Apalagi Islam dari negara-

negara Arab, yang mereka anggap bahwa bangsa Arab adalah sesuatu hal yang buas dan tidak beragama, dan memusuhi Israel. Hal tersebut didapatkan masyarakat AS dari buku buku sekolah Studi L.K. Kenny tahun 1972. (Khadhar, 2005)

Tentu saja dari minimnya informasi yang benar mengenai Islam membuat Trump lebih mudah dalam mendoktrin pemikiran masyarakat AS. Hal ini di perkuat dengan adanya kebijakan eksekutif Donlad Trump dimana Trump melarang imigran dari negara mayoritas muslim untuk masuk ke AS. (Republika.co.id, 2018) Kebijakan kontroversial Presiden Donald Trump dalam executive ordernya adalah memblack list 7 negara mayoritas muslim untuk masuk ke Amerika Serikat. Ketujuh warga negara yang dilarang masuk ke Amerika Serikat tersebut yaitu Suriah, Irak, Iran, Yaman, Libya, Somalia, dan Sudan. Selain melarang warga negara dari tujuh negara tersebut, Trump juga memerintahkan untuk menghentikan semua langkah pengungsi yang ingin masuk ke Negara Super Power tersebut.

Kebijakan imigrasi pemerintahan Trump merupakan bagian dari janji politik pada saat masa kampanye Presiden Trump yaitu "American First". Hal ini merupakan kebijakan populis nasionalistik untuk memproteksi kepentingan AS dari segala bentuk ancaman. (Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, 2017) Konsekuensi dari kebijakan tentang imigrasi ini tidak saja berdampak bagi mereka yang baru mendarat di berbagai airport di AS, namun juga menyebabkan sejumlah warga Amerika yang merupakan keturunan dari ketujuh negara tersebut tidak bisa kembali kenegarannya. Bahkan warga yang masih tinggal disana terancam dideportasi, walaupun mereka sudah terdaftar sebagai permanen resident (green card owners).

Sejumlah mahasiswa yang akan melanjutkan studinya ke AS pun terancam gagal. Begitu pula sejumlah travel yang mempunyai nama yang identik dengan Islam

ditahan di bandara sampai belasan jam, tanpa adanya makanan, serta diperiksa seperti halnya terrorist.

Peristiwa tersebut dinamakan dengan kebijakan Muslim Travel Ban. Kebijakan tersebut digadang-gadang sebagai respon dari kejadian penembakan masjid yang terjadi pada tanggal 1 Desember 2015 di Pusat Penyandang Difabel, San Bernardino, California. Kejadian tersebut menewaskan 14 orang serta mlukai 17 orang lainnya (Suseno, 2016).

Selain itu pemilihan dari 7 negara dalam kebijakan tersebut juga beralasan. Dimana tujuh negara tersebut merupakan negara-negara yang diwaspadai dari masa pemerintahan Obama. Negara-negara tersebut diidentifikasi sebagai negara yang memiliki organisasi teroris yang beroperasi secara pesat di suatu kawasan. (BBC News Indonesia, 2017) Dimana Trump beranggapan bahwa 7 negara tersebut memiliki potensi yang cukup besar sebagai ancaman Amerika Serikat.

Dengan munculnya kebijakan Muslim Travel Ban banyak kalangan yang merespon bahwa kebijakan Muslim Travel Ban merupakan sesuatu yang inkonstitusional dan melanggar Bill of Right dan Magna Charta. Dalam konstitusi AS, setiap warga negara harus dilindungi hak-haknya dari aksi-aksi yang dilakukan oleh Negara, seperti hak kebebasan beragama, dindungi dari ancaman yang mengancam jiwa, dan sama dimata hukum. (Fahmi, 2017)

Kontroversi Muslim Travel Ban juga mendapatkan respon dari berbagai kalangan di Dunia Internasional. Komunitas Muslim pun juga ikut merespon dari adanya Muslim Travel Ban tersebut, dan tidak dapat terlepas tentu saja Muslim Travel Ban juga mendapatkan respon berbagai macam dari 7 negara korban kebijakan tersebut.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka yang menjadi rumusan masalah adalah

sebagai berikut: “Bagaimana respon berbagai negara korban kebijakan Muslim Travel Ban pada masa kepemimpinan Donald Trump?”

### **C. Landasan Teori**

Untuk membahas permasalahan diatas, maka penulis akan menggunakan teori sebagai berikut:

#### ***Politik Luar Negeri***

Menurut pengertian umum, politik luar negeri (foreign policy) merupakan suatu perangkat formula nilai, sikap, arah serta sasaran untuk mempertahankan, mengamankan, dan memajukan kepentingan nasional di dalam percaturan dunia internasional (YM). Suatu negara akan mengupayakan sebagaimana mungkin kepentingan nasionalnya melalui strategi dan rencana yang dibentuk oleh para pembuat keputusan, dan keputusan tersebut akan menjadi sebuah kebijakan luar negeri dari negara tersebut.

K. J. Holsti mengartikan politik luar negeri sebagai berikut:

*“foreign policy also incorporates ideas that are planned by policy makers in order to solve a problem or uphold some changes in the environment, which can be in the forms of policies, attitudes, or actions of another states or states”.*

Pengertian tersebut dapat diartikan bahwa politik luar negeri merupakan sebuah tindakan yang dilakukan oleh suatu negara sebagai respon terhadap usaha perlindungan serta pencapaian kepentingan nasionalnya dan juga refleksi dari arah kebijakan dan perilaku politik sebuah negara terhadap negara lain. Respon tersebut bisa dalam bentuk aksi, reaksi militer, sikap diplomatik tertentu, ide atau gagasan, doktrin/ideologi, tindakan-tindakan persuasif dan kooperatif, strategi non block, dan

sebagainya yang berhubungan dengan nasional yang berorientasinya ke luar negeri. (Safitri L. , 2011)

Dalam pengambilan sebuah kebijaksanaan politik luar negeri, suatu negara akan menjadikan beberapa pertimbangan dalam membentuk kebijakan tersebut. Seperti yang dijelaskan oleh William D. Coplin sebagai berikut:

*To be interested in why states behave as they do interest area, we have to be interested in why their leaders make the decision. However, it would be mistake to think that foreign policy makers act in vacum. On the contrary, any given foreign policy act may be viewed as the result of three board categoriees of considerations affecting the foreign policy decision maker. The first is domestic politic within the foreign policy decision makers state. The second is the economy and military capability of the state. The third is international conctect the particular position in which his state finds it self specially in relation to other state in system.* (Coplin, 1992)

Dalam pernyataan diatas, dapat diartikan apabila kebijaksanaan dalam pembentukan politik luar negeri suatu negara dipengaruhi tiga faktor mendasar. Yang pertama adalah faktor keadaan politik dalam negeri suatu negara. Lalu yang kedua faktor kondisi ekonomi dan kemampuan militer suatu negara tersebut. Dan yang terakhir adalah keadaan internasional suat negara tersebut. (Coplin, 1992)

Dari penjelasan diatas dapat diartikan bahwa politik luar negeri merupakan sebuah tindakan yang ddilakukan oleh suatu negara sebagai respon terhadap perilaku politik suatu negara terhadap negara lain. Respon yang dikeluarkan dalam bentuk Politik Luar Negeri suatu negara bisa dalam berbagai macam bentuk seperti bentuk militer, sikap diplomatik dan sebagainya. Politik luar negeri yang dikeluarkan negara korban, ditunjukkan sebagai respon dari adanya kebijakan Muslim Travel Ban dalam bentuk sikap diplomatik negara mereka terhadap Amerika Serikat. Selain itu kebijakan yang dikeluarkan

oleh berbagai negara korban juga mempertimbangkan tiga faktor dalam pembuatan kebijakan tersebut diantaranya faktor politik domestik, ekonomi dan militer, dan keadaan internasional negara mereka.

#### **D. Hipotesa**

1. Melalui perspektif politik luar negeri menurut Holsti politik luar negeri merupakan sebuah tindakan yang dilakukan oleh suatu negara sebagai respon kebijakan atau perilaku politik suatu negara terhadap negara lain. Respon yang dikeluarkan berbagai negara korban dari adanya kebijakan Muslim Travel Ban dalam bentuk sikap diplomatik negara tersebut terhadap Amerika.

2. Sedangkan menurut William D. Coplin, dalam pembuatan kebijakan luar negeri suatu negara dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor diantaranya adalah faktor keadaan politik dalam negeri, kondisi ekonomi dan militer, lalu yang terakhir adalah faktor keadaan lingkungan suatu negara tersebut. Dengan adanya faktor keadaan negara yang berbeda antara negara satu dengan yang lain, maka membuat penulis mengelompokkan respon yang dikeluarkan ketujuh negara korban dalam bentuk sikap diplomatik tersebut terbagi menjadi dua kelompok, yaitu:

- 1) Negara dengan respon “Membalas”
- 2) Negara dengan respon “Menyayangkan” dan
- 3) Negara tidak mengeluarkan respon apapun

#### **E. Metode Penelitian**

Penelitian ini dikaji dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, yaitu dengan mengumpulkan data-data kemudian data-data tersebut akan dikaji berdasarkan landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini dan mampu menjawab pertanyaan dari rumusan masalah dan kemudian dapat ditarik kesimpulan dalam penelitian ini. Sistematika pengambilan data dalam penelitian ini

menggunakan studi literatur yang berasal dari jurnal, artikel, media cetak maupun digital, dan buku.

#### **F. Jangkauan Penelitian**

Penelitian ini menjelaskan pada kebijakan Muslim Travel Ban yang dibentuk pada masa kepemimpinan Donald Trump pada tahun 2015-2017. Serta penelitian ini akan membuktikan bagaimana sikap diplomatik berbagai negara korban kebijakan Muslim Travel Ban (Suriah, Iran, Irak) terhadap Amerika sebagai respon dari adanya kebijakan Muslim Travel Ban

#### **G. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan bertujuan untuk mempermudah pemahaman dan penelaahan penelitian. Dalam sistematika penulisan pada penelitian ini dijabarkan dalam empat bab, yakni, Bab I dalam bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, kerangka konseptual (teori), hipotesa, serta sistematika penulisan.

Bab II didalam bab ini akan dibagi menjadi dua bagian dimana bagian pertama akan menjelaskan Politik Luar Negeri masing-masing negara seperti negara Suriah, Iran, Irak,. Lalu pada bagian kedua akan menjelaskan Politik Luar Negeri masing-masing negara tersebut terhadap Amerika.

Bab III didalam bab ini akan menjelaskan tentang kebijakan Donald Trump yaitu kebijakan Muslim Travel Ban.

Bab IV didalam bab ini akan menjelaskan analisis penggunaan teori Politik Luar Negeri dalam penerapan kasus respon berbagai negara korban kebijakan Muslim Travel Ban.

Bab V didalam bab ini akan menjelaskan kesimpulan dari pembahasan isu Respon Berbagai Negara Korban Terhadap Kebijakan Muslim Travel Ban pada Masa Kepemimpinan Donald Trump, dan penutup.